

LAHIRNYA NASIONALISME MODERN INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Perlawanan berabad-abad terhadap bangsa-bangsa Eropa Barat atas dasar pertimbangan keagamaan dan dorongan kepentingan perdagangan itu terjadi secara sporadis, terbatas hanya dalam lingkungan wilayah-wilayah tertentu, belum meliputi seluruh wilayah “Indonesia”. Perlawanan yang didorong oleh keinginan menjadi bangsa yang merdeka dan meliputi seluruh wilayah “dari Sabang sampai Merauke” baru bersemi bibit-bibitnya setelah pemerintahan kolonial Belanda, atas desakan kaum sosialis, humanis dan reformis liberal di Eropa, memperkenalkan apa yang dinamakan “Politik Etis” (*Etische Politiek*) kepada penduduk jajahan. Dengan politik etis itu, rencana pendidikan modern (Belanda) mulai dirancang secara menyeluruh dan diterapkan di hampir semua wilayah. Untuk kelengkapan usaha memahami hakikat Indonesia kita, dirasa cukup penting mengetahui lebih jauh sistem pendidikan kolonial itu dan dampaknya bagi pertumbuhan bangsa. Berikut ini sebuah penjelasan singkat tentang sistem pendidikan kolonial itu dan beberapa implikasinya bagi rakyat Indonesia.

Pendidikan Kolonial Belanda

Struktur pendidikan itu sendiri dan sistemnya masih mengikuti konsep stratifikasi kolonial penduduk tanah jajahan. Stratifikasi

itu mengenal jenjang tinggi-rendah pembagian warga masyarakat, sejak dari yang paling atas yang terdiri dari penduduk Eropa, disusul “Timur Asing” (terutama Arab dan Cina), kemudian aristokrat pribumi (“priyayi”) dan akhirnya rakyat umum. Patut diperhatikan bahwa ke dalam kategori “rakyat umum” itulah para warga masyarakat kalangan pondok pesantren secara keseluruhan tercakup.

Pada tingkat pendidikan dasar, untuk golongan Eropa tersedia ELS (*Europese Lagere School*-Sekolah Dasar Eropa). Untuk golongan Timur Asing tersedia HAS (*Hollands-Arabische School*-Sekolah Belanda Arab) dan HCS (*Hollands-Chinesche School*-Sekolah Belanda Cina). Untuk golongan priyayi atau aristokrat pribumi tersedia HIS (*Hollands-Inlandse School*-Sekolah Belanda Pribumi). Terakhir, untuk rakyat umum tersedia *Volkschool*, Sekolah Rakyat, di tingkat desa dengan program belajar selama tiga tahun, dan *Vervolgschool*, Sekolah Rakyat Lanjutan, di tingkat kecamatan dengan program belajar selama lima tahun.

Sekolah-sekolah tingkat lanjutan pertama dan atas juga disediakan, tetapi terbuka hanya untuk yang terpilih dari kalangan lulusan jenis-jenis sekolah elite, yaitu ELS, HAS, HCS, dan HIS saja. Bagi lulusan jenis sekolah rakyat, semua pintu pendidikan lanjutan tertutup. Pemerintah kolonial menyediakan pendidikan dasar umum lanjutan, yaitu MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*). Sekolah lanjutan atas terbagi antara yang masih memberikan pendidikan umum, AMS (*Algemene Middelbare School*), dan yang memberikan pendidikan khusus dalam bidang keahlian tertentu. Paling utama di antara pendidikan keahlian itu ialah HBS (*Hogere Burgelijke School*) dan OSVIA (*Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren*), yang menghasilkan pegawai pemerintahan dalam negeri (*Binnenlands Bestuur*). Juga ada sekolah menengah atas bidang pertanian, yaitu MLS (*Middelbare Landbouw School*) di Bogor, yang berkembang dan meningkat menjadi IPB. Selain itu ada sekolah-sekolah yang lebih khusus seperti *Schakel School*, sekolah peralihan dari lulusan sekolah rakyat untuk dapat meningkat

ke sekolah yang ada di atasnya. Juga disediakan sekolah-sekolah pendidikan guru seperti HIK (*Hollands-Inlandse Kweekschool*) dan suatu jenis sekolah yang disebut *Normaal School*.

Pada tingkat perguruan tinggi, pemerintahan kolonial memperkenalkan beberapa jenis pendidikan keahlian, seperti bidang teknologi (khususnya teknologi pengairan guna menunjang industri gula di Jawa), yaitu THS (*Technise Hoge School*-kini ITB) di Bandung; bidang kedokteran, yaitu GHS (*Geneeskundige Hoge School*-kini FK-UI) di Batavia (Jakarta); dan bidang hukum, ekonomi dan ilmu-ilmu sosial, yaitu RHS (*Rechts Hoge School*-Sekolah Tinggi Hukum, yang kini dipecah-pecah menjadi fakultas-fakultas hukum, ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan politik dalam lingkungan UI) di Weltevreden, Jakarta Pusat sekarang.

Beberapa jenis sekolah keahlian menengah-tinggi juga disediakan, yaitu pendidikan “dokter Jawa” pada STOVIA (*School tot Opleiding voor Indlandse Artsen*-Sekolah Persiapan Dokter Pribumi atau “dokter Jawa”) di Jakarta, dan NIAS (*Nederlands Indise Artsen School*-Sekolah Dokter Hindia Belanda, kini FK Unair) di Surabaya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, suatu kenyataan amat penting ialah bahwa pendidikan menengah dan tinggi itu semua dapat dimasuki hanya oleh anak-anak Eropa, Timur Asing, dan Pribumi Priyayi. Sedangkan untuk rakyat hanya tersedia Sekolah Rakyat. Lebih dari itu, para anggota masyarakat lingkungan pondok pesantren pimpinan para ulama, bukan saja hak mereka diingkari, bahkan mereka sendiri, sebagaimana telah dikemukakan di atas, sengaja memilih untuk menentang dan memboikot pendidikan Belanda itu semua, yang mereka nyatakan sebagai barang haram. Telah pula disinggung di depan, sikap heroisme non-koperatif total dari pihak para ulama dan masyarakat pondok pesantren, selain memberi kekuatan besar sekali kepada daya tahan perjuangan melawan penjajahan, juga membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi para ulama dan masyarakatnya sendiri, justru di masa kemerdekaan. Perlawanan terhadap sistem pendidikan

kolonial itu mendorong para ulama untuk mendirikan lebih banyak pondok pesantren. Kompleks Jombang-Kediri di Jawa Timur merupakan tempat konsentrasi terbesar pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren itu kebanyakan didirikan pada sekitar awal abad yang lalu, saat pemerintah penjajah mulai memperkenalkan sistem pendidikan kolonialnya.

Bibit Nasionalisme Modern Indonesia

Pengertian “nasionalisme” di sini memang harus diberi kualifikasi “modern”, bahkan untuk Indonesia diletakkan dalam bingkai perikemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab nasionalisme “kuna”, seperti banyak dikhawatirkan orang, adalah ekstensi paham kesukuan atau tribalisme yang sempit dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Sebaliknya, nasionalisme modern adalah paham tentang hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan, karena itu, anti-imperialisme, jadi konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nasionalisme modern akan melahirkan kestabilan dan akan berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan suku-suku dan kelompok-kelompok etnis yang terpisah-pisah. Karena itu nasionalisme merupakan unsur esensial bagi pembangunan bangsa (*nation building*) untuk Indonesia, sebuah bangsa dan negara yang fragmentasi etnis dan kesukuan ataupun unsur-unsur perbedaan sosial-kultural selalu merupakan ancaman bagi stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Suatu “akibat tak disengaja” (*unintended consequence*) pendidikan muncul dan berkembang dengan dampak yang jauh lebih besar daripada tujuan semula pendidikan itu. Sekalipun didirikan dengan tujuan semula untuk mendidik tenaga medis murah dari kalangan penduduk pribumi (“dokter Jawa”)-antara lain sebagai pendamping dokter-dokter Belanda sendiri dalam mengatasi persoalan kesehatan di tanah jajahannya-tapi justru dari STOVIA dan NIAS muncul bibit-bibit nasionalisme modern di kalangan

masyarakat Hindia Belanda, berkat kepeloporan Dokter Wahidin Sudirohusodo dan Dokter Sutomo. Bibit-bibit dalam persemaian STOVIA dan NIAS itu kemudian bersemi dan tumbuh subur. Mula-mula sebagai dorongan lahirnya gerakan kultural priyayi Jawa Budi Utomo, kemudian tumbuh sebagai dorongan berkembangnya perkumpulan kepemudaan dalam batas kesukuan atau kepulauan dan kedaerahan seperti *Jong Java*, *Jong Sumatera*, *Jong Ambon*, *Jong Celebes*, saat kata pengenalan “Indonesia” yang lebih menyeluruh belum digunakan.

Dalam gabungannya dengan kesadaran umum masyarakat akan kedudukan mereka sebagai golongan yang tertindas dan tergecekan oleh kolonialisme Belanda, semangat nasionalisme modern itu membangkitkan gerakan Sarekat Dagang Indonesia (SDI) oleh Haji Samanhudi dengan cakupan pendukung yang tidak lagi terbatas oleh lingkungan kedaerahan atau kesukuan, tetapi meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Dalam dunia kepemudaan pun tumbuh gerakan yang *platform* komitmennya lebih tinggi dan lebih luas daripada kesukuan atau kedaerahan, seperti JIB (*Jong Islamieten Bond*) dan anak organisasinya, SISC (*Studenten Islam Studies Club*), yang kelak melahirkan banyak kelompok intelektual Masyumi.

Sekitar saat-saat itulah menguat keinginan menggunakan suatu nama pengenalan bagi agregat kebangsaan yang sedang tumbuh. Maka istilah “Indonesia” yang sudah cukup lama tersimpan dalam khazanah antropologi (James Richardson Logan dari Inggris, 1850; dan Adolf Bastian dari Jerman, 1886) mulai sering muncul dalam wacana kaum nasionalis. Dalam makna politisnya, para pelajar dan mahasiswa di Negeri Belanda yang berasal dari kawasan Nusantara pada tahun 1917 menggunakan nama “Indonesia” untuk organisasi mereka, *Indonesisch Verbond van Studerenden*. Ketika diasingkan ke Negeri Belanda, Ki Hajar Dewantara pada 1918 di Den Haag mendirikan *Indonesisch Persbureau* (Kantor Berita Indonesia). Nama “Indonesia” untuk bangsa muda yang sedang dibangun dengan penuh semangat itu digunakan Bung Hatta di Negeri Belanda dalam pleidooinya, “Indonesia Merdeka” (*Indonesie Vrij*), Maret

1928. Kemudian dikukuhkan dalam salah satu peristiwa amat menentukan bagi sejarah bangsa kita, yaitu Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dikobarkan lagi oleh Bung Karno dalam pidato “Indonesia Menggugat” (*Indonesie Klag Aan*), 1930.

Penyebutan nama “dagang” dalam gerakan Sarekat Dagang Islam rintisan saudagar Solo Haji Samanhudi menunjukkan adanya garis kelanjutan historis, kultural, dan ekonomis dengan keadaan umum Asia Tenggara sebagai bagian dari budaya *hemispheric* Islam sebelum masa jajahan Barat. Tetapi ketika SDI mengembangkan dirinya menjadi SI (Sarekat Islam) dan meninggalkan agenda perjuangan yang terbatas hanya kepada bidang perdagangan, gerakan Haji Samanhudi secara tidak terhindarkan bersentuhan dengan bibit-bibit gagasan nasionalisme modern rintisan kaum pribumi terdidik seperti Wahidin dan Sutomo. Maka ketika berkembang pesat dengan basis pergerakannya di Surabaya di bawah pimpinan Haji Omar Said Tjokroaminoto, SI benar-benar menjadi tempat persemaian gerakan nasionalis radikal yang menjadikan kemerdekaan bangsa sebagai tujuan perjuangan. Meskipun dinamika itu kelak berimbas negatif kepada keorganisasian formal SI yang membuatnya pecah menjadi “SI Putih” dan “SI Merah”, namun gelora nasionalisme radikal yang ditebarkan di seluruh medan pergerakan bangsa berkembang dinamis bergulung-gulung menjadi energi politik yang tidak terlawan. Sebuah bangsa baru kemudian benar-benar lahir ke dunia, menunggu pertumbuhannya mencapai kedewasaan penuh melalui kemerdekaan dari penjajahan. Sebuah bangsa yang tidak mendasarkan eksistensinya kepada rasialisme, etnisisme, sektarianisme dan lain-lain pertimbangan eksklusif, tetapi kepada cita-cita bersama menciptakan maslahat umum, kesejahteraan bagi semua.

Peranan Bahasa Melayu-Indonesia

Telah dikemukakan bahwa pada mulanya kelahiran dan pertumbuhan Indonesia sebagai bangsa yang utuh menghadapi tantangan

kenyataan banyaknya suku, bahasa, dan pola budaya yang sangat beraneka ragam yang terpecah di seluruh pelosok wilayah. Tantangan ini dijawab dengan mengangkat bahasa Melayu logat Riau Kepulauan (dengan Pulau Penyengat sebagai pusat bahasa dan budayanya) untuk menjadi bahasa persatuan. Bahasa Melayu adalah *lingua franca* Asia Tenggara, kelanjutan prototipenya di zaman Sriwijaya dengan dukungan kekuasaan bahari (maritim). Bahasa Melayu kemudian ditingkatkan lebih tinggi daripada sekadar *lingua franca* dan dikembangkan menjadi bahasa buku untuk agama, sastra, dan kebudayaan oleh para ulama dan cendekiawan Kesultanan Aceh dengan menggunakan huruf Arab (yang kemudian disebut “huruf Jawi”—sesuai dengan kebiasaan penduduk Tanah Suci yang memandang keseluruhan Asia Tenggara sebagai “Jawa” dan penduduknya orang “Jawi”). Rintisan Aceh menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dan dalam perpaduannya dengan kegiatan perdagangan, bahasa Melayu menjadi bahasa dengan penutur yang memiliki mobilitas tinggi. Karena itu bahasa Melayu menjadi berwatak kosmopolit, dengan ciri-ciri perkembangan yang dinamis, bebas, terbukti dan egaliter.

Kemajemukan Budaya Nusantara

Kualitas-kualitas itu membuat bahasa Melayu sangat sejalan dengan wawasan negara-bangsa modern (*modern nation-state*). Dengan penggarapan lebih lanjut oleh para cendekiawan modern dari Sumatera, khususnya Sumatera Barat, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia modern sekarang ini. Dengan bahasa Melayu sebagai sahamnya, meminjam jargon dalam dunia komputer, Sumatera dan Luar Jawa pada umumnya telah menyediakan “perangkat lunak” (*software*) bagi hakikat Keindonesiaan. Sedangkan Pulau Jawa, yang selalu berperan sebagai pusat kekuasaan dalam ukuran besar dan luas, menyediakan “perangkat keras” (*hardware*) baginya. Pembagian itu sejalan dengan pola budaya Indonesia yang secara garis besar

mengenal adanya dua orientasi: yang lebih egaliter pada pola budaya pesisir (*coastal culture*) dan yang lebih hierarkis pada pola budaya pedalaman (*inland culture*). Secara umum dapat dikatakan bahwa kedua pola budaya besar Indonesia itu tergambarkan dalam falsafah dan kosmologi arsitektur dua momentum kuno Indonesia paling agung: Borobudur yang lebih melebar ke segala penjuru, sesuai dengan jiwa agama Budha yang meluas dan egaliter, di satu pihak, dan Roro Jonggrang (Prambanan) yang vertikal dan menjulang, sesuai dengan sifat agama Hindu yang mendalam dan bertingkat, di pihak lain. Budhisme adalah falsafah keagamaan kerajaan Luar Jawa Sriwijaya yang bersemangat bahari (kelautan, maritim), dan Hinduisme adalah falsafah keagamaan kerajaan Jawa Majapahit yang kekuatannya banyak bertumpu pada kesuburan tanah-tanah pertanian pedalaman Jawa yang sangat produktif.

Tetapi karena Majapahit berdiri dengan latar belakang kejayaan Budhisme (Borobudur) dan Hinduisme (Roro Jonggrang) sekaligus, di samping juga mengembangkan kekuatan dan kekuasaan bahari yang ekspansif, maka muncul ide oleh Empu Tantular, seorang filosof Majapahit, untuk mengusahakan rekonsiliasi antara berbagai aliran keagamaan yang ada, dalam semangat paham kemajemukan atau pluralisme atas dasar keyakinan tentang adanya kesatuan esensial di balik perbedaan formal. Semuanya beranekaragam, namun hakikatnya satu jua, sebab tidak ada jalan kebaktian atau kebaikan yang mendua tujuan (*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*).

Walaupun begitu, perbedaan relatif tidak mungkin dihapuskan, dan kedua pola budaya pesisir dan pedalaman itu tetap mempengaruhi bangsa Indonesia secara keseluruhan, sekalipun sebagian besar warga masyarakat telah beralih ke agama Islam. Ketegangan dalam interaksi antara kedua pola budaya dengan perbedaan relatif itu telah menjadi salah satu sumber berbagai persoalan nasional Indonesia. Tetapi kedua-duanya saling melengkapi, dengan arah menuju konvergensi yang semakin kuat dan rapat. Hal itu terjadi lebih-lebih dengan peran Islam yang meliputi

seluruh “universum” Nusantara, dan kosmopolitanisme baru akibat penyatuan administratif pemerintahan kolonial yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Unsur-unsur budaya menyeluruh itu merupakan payung bersama untuk Jawa dan Luar Jawa, dan berperan sebagai pendorong terjadinya proses-proses konvergensi. Pada terjadinya konvergensi besar menuju ke arah titik-titik temu itulah terletak jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan ketangguhannya. [❖]